

**PENETRASI KONFLIK PASCA PEMILUKADA 2018 SI KABUPATEN
SIDRAP (SUATU KAJIAN SOSIOLOGI KONFLIK)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Program Studi Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

ASTRI PUSPITA SARI

NIM 10538327115

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
JUNI, 2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Astri Puspita Mandasari, 10538327115** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 165 Tahun 1441 H/2019 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Ahad, 29 September 2019

28 Muharram 1441 H
Makassar, _____
28 September 2019 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM.

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd.


Penguji

1. Dr. Eliza Meiyani, M.Si.
2. Sam'un Mukramin, S.Pd., M.Pd.
3. Jamaluddin Anifin, S.Pd., M.Pd.
4. Dra. Hj. Rahmah Badaruddin, M.Si.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934


Drs. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penetrasi Konflik Pasca Pemelukada 2018 Di Kabupaten Sidrap
(Suatu Kajian Dalam Sosiologi Konflik)

Nama : Astri Puspita Mandasari

NIM : 10538327115

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

28 Muharram 1441 H
Makassar,

28 September 2019 M

Disahkan oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

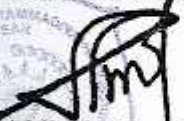

Dr. Jaelan Usman, M.Si.


Jamaluddin Arifin, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934


Drs. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474



SURAT PERNYATAAN

Nama : **ASTRI PUSPITA MANDASARI**
NIM : 10538 3271 15
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Judul Skripsi : **Penetrasi Konflik Pasca Pemilukada 2018 di Kabupaten Sidrap (Suatu Kajian dalam Sosiologi Konflik)**

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah asli hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan atau dibuatkan oleh orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, September 2019

Yang Membuat Pernyataan


ASTRI PUSPITA MANDASARI

10538 3271 15



SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASTRI PUSPITA MANDASARI**

NIM : 10538 3271 15

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Judul Skripsi : **Penetrasi Konflik Pasca Pemilu 2018 di Kabupaten Sidrap (Suatu Kajian dalam Sosiologi Konflik)**

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesainya skripsi ini, saya yang menyusunnya sendiri (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi ini yang selalu melakukan konsultasi dengan pembimbingan yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi saya.
4. Apabila saya melanggar perjanjian saya seperti butir 1, 2 dan 3 maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang ada.

Makassar, September 2019

Yang Membuat Pernyataan

ASTRI PUSPITA MANDASARI





10538 3271 15

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ASTRI PUSPITA MANDASARI
 STAMBUK : 10538 3271 15
 JURUSAN : Pendidikan Sosiologi
 PEMBIMBING : Dr. Jaelan Usman, M.Si.
 JUDUL SKRIPSI : Penetrasi Konflik Pasca Pemilukada 2018 di Kabupaten Sidrap (Suatu Kajian dalam Sosiologi Konflik)

Konsultasi Pembimbing I

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 11/9 2019	- Abstrak belum ada (langgani) - kata pengantar, perbaiki - latar belakang, belum jelas apa masalah yg di bahas.	
2.	Jumat, 13/9 2019	- Rumusan Masalah harus menyebut pd latar belakang - Tinjauan pustaka, batasi pd teori yg relevan	
3.	---	- kerangka pikir, harus berangkat dari teori yg politika publik - Hasil dan Pembahasan, harus dikaitkan dgn teori pd Bab II.	
4.	Senin, 16/9	- Acep ujian tutup	

Catatan :

Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian Skripsi jika sudah konsultasi ke Dosen Pembimbing minimal 3 kali

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi


Dr. F. Nardin, M.Pd.
 NPM. 575 474



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ASTRI PUSPITA MANDASARI
 STAMBUK : 10538 3271 15
 JURUSAN : Pendidikan Sosiologi
 PEMBIMBING : Jamaluddin Arifin, S.Pd., M.Pd.
 JUDUL SKRIPSI : Penetrasi Konflik Pasca Pemilukada 2018 di Kabupaten Sidrap (Suatu Kajian dalam Sosiologi Konflik)

Konsultasi Pembimbing II

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
	12/9/19	Tugas BAB I sampai II - Operasionalkan kerangka pikir - Perbaiki hasil print	
	13/9/19	Tuntal penulisan - Perkeas uraian teori - Rerubrikasi kompilasi - Lay out akhir - Lembar cover	

Catatan 16/9/19 Ace
 Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian Skripsi jika sudah konsultasi ke Dosen Pembimbing minimal 3 kali

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi

Drs. H. Nurdin, M.Pd.
 NBM. 575/474

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Ali bin Abi Thalib.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya ini saya persembahkan untuk:

Bapak dan ibu saya, yang selalu memberikan motivasi serta dukungan dan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa terbalaskan.

ABSTRAK

**PENETRASI KONFLIK PASCA PEMILUKADA 2018 DI KABUPATEN SIDRAP
(SUATU KAJIAN DALAM SOSIOLGI KONFLIK)**

**OLEH
ASTRI PUSPITA MANDASARI
10538327115**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan fenomenologi. bertujuan untuk mengetahui dinamika konflik yang terjadi pada proses pemilukada 2018 berlangsung. Yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana konflik yang terjadi pasca pemilukada 2018 di daerah kabupaten sidrap. Dan juga untuk mengetahui bentuk penetrasi konflik pasca pemilukada 2018 didaerah sidrap.

Adapun yang melatar belakangi penulisan ini adalah pilkada yang dirangcang sebagai demokrasi electrolat justru, menjadi ajang baru timbulnya konflik yang justru melegitimasi munculnya kekerasan akibat perbedaan yang sulit ditolelir antara pihak-pihak berkepentingan di arena demokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi pasca pemilukada 2018 didaerah sidrap adalah akibat dari asumsi masyarakat yang mempertahankan eksistensi etitasnya demi dirinya sendiri. Bentuk penetrasi konflik yang terjadi pasca pemilukada 2018 di daerah sidrap yaitu adanya faktor kekuatan kultur yang dimaksud disini adalah (hubungan keluarga) dan adanya kekuatan kepentingan dalam hal ini (hubungan kerja).

Kata kunci: Pemilukada, konflik.

ABSTRAK

**PENETRASI KONFLIK PASCA PEMILUKADA 2018 DI KABUPATEN SIDRAP
(SUATU KAJIAN DALAM SOSIOLGI KONFLIK)**

**OLEH
ASTRI PUSPITA MANDASARI
10538327115**

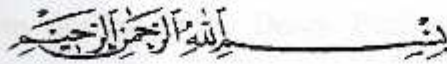
This study uses a qualitative descriptive method. With a phenomenological approach. aims to determine the dynamics of the conflict that occurred in the 2018 post-conflict local election process. The problem formulation is how the conflict occurred after the 2018 post-conflict local election in the district of Sidrap. And also to find out the form of conflict penetration after the 2018 post-conflict local election.

As for the background of this writing is the election which was designed as an electrolat democracy precisely, becoming a new arena for the emergence of conflict which legitimizes the emergence of violence due to differences that are difficult to tolerate between stakeholders in the arena of democracy.

The results showed that the conflict that occurred after the owner of 2018 in the sidrap area was the result of the assumptions of the community that defended the existence of its ethics for its own sake. The form of penetration of conflicts that occurred after the 2018 post-conflict local election in the sidrap area is the existence of a cultural strength factor referred to here is a family relationship and the presence of a strength of interest in this matter (work relationship).

Keywords: post-conflict local election, conflict.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT sang *realitas* sejati yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Dan tak lupa kita kirimkan salawat atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sang revolusioner sejati, yang telah mengangkat derajat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman pencerdasan sehingga penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul "penetrasi konflik pasca pemilukada 2018 di kabupaten sidrap (suatu kajian dalam sosiologi konflik)"

Skripsi ini sengaja disusun sebagai syarat menyelesaikan salah satu mata kuliah dalam program strata I (SI) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini dapat pula digunakan oleh para mahasiswa yang tengah menyusun tugas kuliah.

Dalam hal ini peneliti banyak mendapatkan kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan, namun berbagai kesulitan itu dapat terlewati semuanya dengan berbagai usaha dan tak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Olehnya itu, sepantasnya peneliti menghanturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E.,M.M , Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Erwin Akib, M.Pd.,Ph.D, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Drs. H. Nurdin, M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan sosiologi
4. Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si, Dosen Pembimbing I yang banyak meluangkan waktunya untuk membimbing selama ini.
5. Bapak Jamaluddin Arifin, S.Pd., M.Pd. Dosen Pembimbing II yang banyak meluangkan waktunya untuk membimbing selama ini.
6. Bapak Drs. Sudirman Sunre, Orang tua yang selalu bekerja keras memberikan dukungan materi dan nonmaterial.
7. Ibu Ramlah S.Pd, Orang tua yang selalu mendokaan dan mensupport dalam segala hal terkait peyusunan skripsi ini.
8. Sahabat dan teman-teman atas kesediaannya membantu dan mensupport dalam penyusunan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun penyusunannya. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritikan konstruktif dari pembaca dan pemakai skripsi ini demi perbaikan dan kelengkapan skripsi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya peneliti berharap dengan adanya Skripsi ini dapat dijadikan bahan referensi demi berkembangnya pendidikan khususnya pembelajaran sosiologi sehingga tujuan akhir dari pembelajaran, yaitu meningkatnya kualitas proses dan hasil pembelajaran sosiologi dapat dicapai, Aamiin

Makassar, September 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERJANJIAN	v
KARTU KONTROL PEMBIMBING I	vi
KARTU KONTROL PEMBIMBING II	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8

D. Manfaat penelitian.....	8
E. Definisi Oprasional.	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. Konsep dinamika konflik.....	12
B. Konsep dinamika polittik.....	20
C. Kerangka Pikir.....	24
D. Penelitian Relevan.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian.....	30
B. Lokasi penelitian.....	32
C. Informan penelitian.....	32
D. Focus penelitian.....	33
E. instrument penelitian.....	34
F. Jenis dansumber data penelitian.....	34
G. Teknik pengumpulan data.....	35
H. Hasil dan analisis data.....	36
I. Teknik keabsahan data.....	37

BAB IV GAMBARAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah lokasi penelitian.....	40
B. Keadaan geografis lokasi penelitian.....	44

C. Keadaan penduduk berdasarakan pendidikan.....	46
D. Keadaan berdasarkan pekerjaan.....	47
E. Keadaan sosial dan budaya	48

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian.....	52
B. Pembahasan.....	59

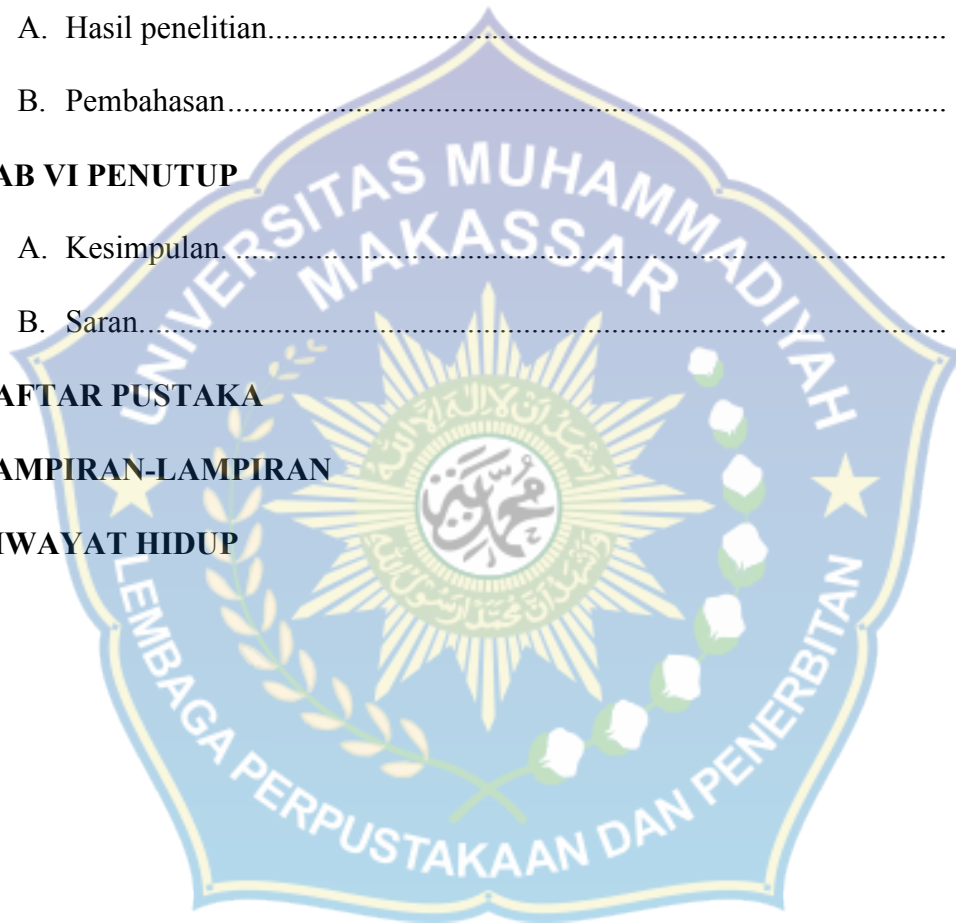
BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Nama Tabel	Halaman
Tabel. II.1	Daftar penelitian relevan	27
Tabel. IV.1	Daftar keadaan penduduk berdasarkan pendidikan.....	46
Tabel.IV.2	Daftar keadaan penduduk berdasarkan pekerjaan.....	48
Tabel.IV.3	Daftar penduduk berdasarkan agama	49
Tabel. IV.4	Daftar penduduk berdasarkan kesehatan.....	51
Tabel.lampiran	Distribusi informan berdasarkan umur.....	68
Tabel lampiran	Distribusi informan berdasarkan jenis kelamin.....	69
Tabel lampiran	Distribusi informan berdasarkan pendidikan	70



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Nama gambar	Halaman
Gambar		
Gambar. VI.1	Peta lokasi penelitian	45



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	judul lampiran	Halaman
Lampiran		
1	Analisis data penelitian.....	68
2	Pedoman wawancara	71
3	Dokumentasi	72
4	surat penelitian.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pemilu merupakan sebuah aktifitas tak terhindari di negara yang menganut sistem demokrasi. Tidak ada sebuah Negara demokrasi yang tidak menjalankan pemilihan bagi sebuah jabatan public dengan melibatkan warga Negara yang berhak memilih (*eligible*).

Indonesia adalah negara demokrasi, disini tampak bahwa Negara Negara demokrasi itu terwujud karena Negara Indonesia menghormati hak-hak asasi manusia dalam memberikan rakyat Indonesia suara, tampak dengan adanya pemilu dimana yang dipilih adalah rakyat Indonesia sendiri untuk mewakili rakyat Indonesia dalam mengatur tatanan pemerintah.

Pemilu bukan hanya diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun juga merupakan suatu rasionalitas administrasi publik yang wajib bagi KPU sebagai institusi publik. Salah satu perwujudan dari digunakannya sistem demokrasi di Indonesia adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.

Pemilihan Kepala sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota dimana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, dan Walikota dan Wakil Walikota untuk kota. Setelah suksesnya Pemilu tahun 2004, mulai bulan Juni

2005 lalu di 226 daerah meliputi 11 propinsi serta 215 kabupaten dan kota, diadakan Pilkada untuk memilih parapemimpin daerahnya. Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangat tinggi.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila di laksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu sendiri. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila di laksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu sendiri.

Hasil pemilihan umum yang di selenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat, di anggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas di perlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara

yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pilkada merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 3 kemudian khusus untuk Pilkada di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 bahwa Kepala Daerah di pilih dalam satu pasangan calon yang di laksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sedangkan tentang penyelenggara pemilu di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 yang kemudian di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011.

Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada langsung di Indonesia, sangat tergantung pada kinerja penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) selaku pelaksana dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) sebagai lembaga pengawasan yang mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan Pilkada. UU No. 15 tahun 2011 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik merupakan hal yang wajar dan biasa karena setiap individu memiliki kepentingan yang berdeda-beda. Ketika kepentingan antara individu atau kelompok saling berbenturan, terjadilah konflik.(Dr.Rusdiana:2015).

Konflik adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang dapat terjadi antar individu, antar kelompok kecil, bahkan antar bangsa dan Negara (Sarwono: 1999).Konflik relatif mudah hadir dari basis sosial yang lebih kompleks, konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus dalam masyarakat. Konflik yang terkontrol akan melahirkan integrasi.

Pada sisi lain, demokrasi juga di yakini oleh sebagian orang sebagai sarana untuk mentransformasikan konflik. Jika dulu orang saling membunuh untuk menjadi raja, kini mereka bertarung melalui bilik suara. Demokrasi berupaya mentransformasikan konflik yang berwujud kekerasan ke arah bilik suara, dari memaksa (coercive) ke persuasif. Pada hakikatnya konflik pasti terjadi, berkonotasi negative, hasil akhir tergantung pada manejemanya, dan perlu dikenali.

Meski demikian, demokrasi dan konflik sebenarnya juga merupakan dua hal yang tidak mudah dihubungkan. Hanya saja, menjadi berbahaya jika konflik sudah represif dan berwujud kekerasan (violence). Dalam wacana demokrasi, konflik tidak di pahami sebagai hal yang negatif, melainkan sebagai satu gejala responsif dalam upaya menciptakan kontrol dan keseimbangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Pilkada, sebagai sebuah mekanisme demokrasi sebenarnya di rancang untuk mentransformasikan sifat konflik yang terjadi di masyarakat. Pilkada berupaya mengarahkan agar konflik tidak meluas menjadi kekerasan. Sayangnya, idealitas

yang dibangun dalam sebuah proses demokrasi, pada kenyataannya seringkali jauh dari apa yang di harapkan.

Pilkada yang di rancang sebagai demokrasi elektoral, justru menjadi ajang baru timbulnya konflik kekerasan dan benturan-benturan fisik antar pendukung calon kepala daerah menjadi pemandangan jamak yang di temui. Singkatnya, mekanisme demokrasi yang ada seolah justru melegitimasi munculnya kekerasan akibat perbedaan yang sulit di tolerir antara pihak-pihak berkepentingan di arena demokrasi.

Posisi-posisi birokrasi strategis akan di pegang oleh orang-orang yang berasal dari basis sosial yang sama. Sebaliknya, orang-orang (pejabat) yang berasal dari basis sosial berbeda akan tersingkir pada posisi pinggiran, yang bahkan sama sekali tidak di perhitungkan. Posisi yang dulunya merupakan posisi "mata air" berubah pada posisi "air mata" di sebabkan perbedaan etnis atau basis sosial lainnya.

Kepala Daerah terpilih akan memprioritaskan penyaluran bantuan sosial atau alokasi dana sosial ke komunitas tertentu yang mempresentasikannya. Akibatnya, kesejahteraan suatu entitas atau komunitas pendukung Kepala Daerah terpilih akan terjamin di banding komunitas lainnya.

Begitu juga jajaran birokrasi yang telah di dominasi oleh komunitas pendukung Kepala Daerah, akan melicinkan jalan memperoleh kesejahteraan bagi komunitasnya. Kesadaran semacam inilah yang nampaknya menjadi landasan masyarakat dalam melihat Pilkada, yang kemudian mendorong mereka berani

mempertaruhkan nyawa, demi mempertahankan eksistensi entitasnya, demi eksistensi dirinya sendiri. Sejauh ini masih banyak yang meyakini. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis meneliti secara mendalam melalui penelitian dengan judul “ Penetrasi Konflik Pasca Pemilukada 2018 di Kabupaten. Sidrap”.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. bahwa terdapat beberapa konflik yang terjadi di daerah kabupaten sidrap pada saat proses dan pasca pemilihan calon bupati tahun 2018 berlangsung. Konflik yang terjadi cukup menyebabkan masyarakat memiliki sifat apatis, motivasi kerja rendah atau perilaku menghambat pekerjaan.

Peneliti juga mendapatkan salah satu faktor penyebab konflik. Pada saat pemilukada berlangsung yang terjadi di sidrap yaitu konflik keluarga. pemicunya dari sifat provokator dari masing-masing tim sukses. Sehingga perbedaan pilihan calon bupati sidap nomor 01 dan 02 terlalu memanas menjadi perbincangan sehingga muncul rasa ingin mencapai suatu tujuan individual.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta panduan wawancara sehingga berbagai konflik di daerah tersebut terjabarkan pada bab hasil dan pembahasan. Dalam bab itu juga menjelaskan tentang bagaimana peneliti menemukan bentuk penetrasi pasca pemilukada yang menjadi solusi bagi konflik yang terjadi. Diantara bersifat lebih berlapang dada dan saling menghargai dapat dijadikan sebagai solusi untuk meredam konflik, Adanya faktor kekuatan kultur yang dimaksud disini adalah (hubungan keluarga) dan adanya kekuatan kepentingan dalam hal ini (hubungan kerja).

Untuk mencegah terjadinya plagiarisme atau yang sering disebut penjiplakan, pengambilan kerangka, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah kerangka dan pendapat sendiri. Maka peneliti harus memiliki nilai kebaruan dari penelitian sebelumnya. Ari ganjar hardiansa 2017, hal yang menjadi pembeda adalah dari judul penelitian yang sebelumnya meneliti tentang Politisasi identitas dalam kompetensi pemilu di Indonesia pasca pemilu 2014. Dimana penelitian ini lebih focus pada mengungkapkan bahwa lemahnya institusionalisasi partai mendorong para politisi berkolaborasi dengan aktor-aktor civil society untuk mereproduksi isu-isu identitas demi kepentingan pemilu. Ihsan kamil 2017, yang menjadi kajian penelitian menganalisa peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil, menganalisa konflik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singki.

Wahyu ngroho 2016, Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia. Hasil dalam kajian ini adalah dibutuhkan konsistensi penegakan hukum untuk taat terhadap sejumlah perangkat hukum pelaksanaan dan prosedur yang beserta sanksi dalam penyelenggaraan pemilu. Moh. Fajar ShodiqRamadlanTri Hendra Wahyudi 2016, Pembinaan Pada Potensi Konflik dan Kontestasi Semu Pemilukada Kota Blitar: Analisis Institusionalisme Pilihan Rasional Artikel ini menjelaskan manajemen konflik pemilukada di Kota Blitar menggunakan pendekatan kelembagaan pilihan rasional, dengan asumsi bahwa lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu mempunyai kemampuan dalam manajemen konflik.

Moh. Sugihariyadi dan Joni Rahardjo 2015, hasil penelitiannya Pertama, menakar profesionalisme dalam penanganan masalah-masalah kepemiluan sepanjang tahun 2014. Kedua, melakukan upaya-upaya penerapan strategi penyelesaian masalah kepemiluan, melalui tiga aspek. yaitu aspek kepemimpinan, aspek integritas, dan aspek independensi.

Sedangkan peneliti sendiri meneliti tentang penetrasi konflik pasca pemilukada 2018 yang lokasi penelitiannya di daerah kabupate Sidrap, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Rumusan masalah

Dari uraian dan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dinamika konflik pasca pemilukada 2018 di kab. Sidrap?
2. Bagaiman bentuk penetrasi konflik pasca pemilukada 2018 di kab. Sidrap?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas , maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dinamika konflik pasca pemilukada 2018 di daerah Sidrap.
2. Untuk mengetahui cara mengatasi konflik pasca pemilukada 2018 didaerah Sidrap.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan penelitian konflik dan politik.

Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini menjadi pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah untuk meminimalisir konflik yang disebabkan oleh pemelukada.

E. Definisi oprasional

Untuk memberi suatu pemahaman agar memudahkan penelitian maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut :

1. Penetrasi Sosial

Kata penetrasi dalam Bahasa Inggris penetration berasal dari kata Latin penetrare, yang menggabungkan penes (“inside“) dan intrare (“to enter“). Kata tersebut paling sering diartikan dengan menembus untuk menggambarkan masuk atau meresap. Penetrasi juga dapat berarti menguraikan atau memahami.

Penetrasi sosial merupakan serangkaian proses pengembangan hubungan individu dengan masyarakat yang dilakukan secara bertahap. Contohnya hubungan tersebut diawali dengan perkenalan, pengungkapan keterbukaan diri

sehingga terciptanya keakraban antara masyarakat atau bahkan bisa jadi contoh hubungan sosial tersebut gagal dikembangkan.

2. Konflik sosial

Konflik secara etimologi berasal dari bahas latin”con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat. Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.(Dr. Rusdiana:2015).

3. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum (disingkat Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain.

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan

main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Di berbagai wilayah Indonesia sendiri sosialisasi pemilu sudah mulai dilaksanakan jauh sebelum pencoblosan. di kab. Sidrap khususnya seluruh tahapan pilkada 2018 telah berhasil dilalui, baik proses kampanye yang berjalan lancar selama hampir 8 bulan hingga ke pelaksanaan pencoblosan yang digelar ada tahun lalu.

Di kab. Sidrap ditargetkan jumlah pemilih mencapai 75,5 persen, tapi partisipasi masyarakat bisa melampaui 80 persen, artinya semua aspirasi budaya sudah diekspresikan pada pencoblosan. Adanya arahan dari bupati sidrap untuk tetap menghormati proses demokrasi yang telah berlangsung dengan berbagai dinamika konflik membuat masyarakat tetap menjaga suasana agar kondusif. Beredarnya beberapa isu dikalangan masyarakat di kab. Sidrap menyebabkan munculnya berbagai dinamika konflik yang terjadi pada saat pemilu.

Ratusan massa mengamuk di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidrap yang beralamat di Pangkajene, Kecamatan. Ratusan massa ini mengamuk karena mereka tidak menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPUD Sidrap. Berdasarkan pantauan, ratusan massa bergerak menuju KPUD Sidrap. Sesampainya di sana, ratusan massa langsung melempari aparat kepolisian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. Konsep Dinamika konflik Sosial

1. Pengertian Dinamika

Dinamika adalah suatu hal yang bersifat berkemampuan atau bertenaga, serta selalu bergerak dan berubah-ubah (Idrus:1996). Dan menurut (Kartono:2007) dinamika adalah suatu bentuk perubahan, baik itu yang sifatnya besar-besaran atau kecil-kecilan, maupun secara cepat atau lambat, yang sifatnya nyata dan berhubungan dengan suatu kondisi keadaan.

Sedangkan dinamika sosial berarti bahwa manusia dan masyarakat selalu berkembang serta mengalami perubahan. Perubahan akan selalu ada dalam setiap kelompok sosial. Ada yang mengalami perubahan secara lambat, maupun mengalami perubahan secara cepat (Soejono soekanto,2006:146).

a. Pengertian Konflik

Istilah “konflik” berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*conflict*” yang artinya pertentangan atau perselisihan. Konflik adalah proses disosiatif dalam interaksi sosial yang terjadi ketika semua pihak dalam masyarakat ingin mencapai tujuannya dalam waktu bersamaan.(Rusdiana:2015)

Salah satu Teori konflik yang terkenal adalah yang dikembangkan oleh (Karl Marx dan Friedrich Engles dalam *Communist Manifesto*,1884). Mereka menganggap bahwa proses terpenting dalam masyarakat adalah terjadinya pertentangan kelas (*class struggle*). Menurut mereka suatu

golongan yang memerintah memiliki kedudukan tersebut, oleh karena menguasai sarana produksi yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat.

(Dahrendorf:13), konflik sosial mempunyai sumber structural, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi sosial. Dengan kata lain, konflik antar kelompok dapat dilihat dari sudut konflik tentang keabsahan hubungan kekuasaan yang ada.

Dan uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perspektif ini memiliki proporsi sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat dalam segala hal tunduk pada proses perubahan; perubahan sosial terjadi dimana saja;
2. Setiap masyarakat dalam segala hal memperlihatkan ketidak sesuaian dan konflik; konflik sosial terdapat dimana saja;
3. Setiap unsur dalam masyarakat memberikan kontribusi terdapat perpecahan dan perubahannya;
4. Setiap masyarakat berdasarkan atas penggunaan kekerasan oleh sebagian anggotanya terhadap anggota yang lain.

Pada umumnya, konflik terjadi karena adanya perbedaan (pendapat, ideologi, budaya, dan lainnya) di masyarakat yang kemudian menimbulkan masalah dan belum ditemukan kesepakatan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab konflik (Gerungan, W.A: 1996):

1. Perbedaan Individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.

Setiap manusia adalah individu yang unik . Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan suatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya.

Misalnya, ketika mahasiswa disalassatu kampus sedang melakukan demonstrasi, tentu perasaan setiap warga ada yang berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena jalanan macet dan juga ada yang merasa senang karena mahasiswa melakukan pergerakan.

2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.

Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

3. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok

Manusia memiliki perasaa,pendirian maupun latar belakang yang berbeda. oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Terkadng orang dapat melakukan hal yang sama,tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda.

4. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Perubahan adalah suatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai kerabatan bergeser menjadi hubungan structural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industry. Perubahan-perubahan ini jika, terjadi secara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

Seperti yang dinyatakan (Parson, Jorgensen dan Hernandes : 1994) bahwa konflik sosial memiliki manfaat bagi masyarakat, yaitu:

1. Konflik dapat meningkatkan kohevisitas dan solidaritas anggota kelompok.
2. Memunculkan isu haerapan terpendam yang dapat menjadi katalisator perubahan sosial.
3. Memperjelas norma dan tujuan kelompok.

4. Munculnya pribadi – pribadi atau mental-mental masyarakat yang tahan uji dalam menghadapi segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi sehingga lebih bisa mendewasakan masyarakat.

Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok - kelompok yang mengalami konflik.

Metode menghadapi konflik Menurut (Sarwono :1999), metode resolusi merupakan suatu proses untuk mengatasi perselisihan atau konflik, antara lain kontak: kontak hubungan langsung, komunikasi, tawar menawar, mediasi, arbitrase, tidak memaksa, konsiliasi, meredakan ketegangan.

Jenis dan sumber konflik menurut (Dr.H.A. Rusdiana,2015):

1. Konflik menyangkut informasi

Pada banyak kejadian, pihak-pihak yang berkonflik tidak memiliki informasi yang cukup, atau bahkan tidak memiliki informasi yang sama tentang suatu situasi. Mengumpulkan dan mengklarifikasikan fakta-fakta yang diperlukan dapat menolong meredakan ketegangan yang terjadi. dalam situasi berbeda, pihak-pihak yang bertikai menafsirkan informasi dengan cara yang berlainan atau memberikan bobot kepentingan yang berbeda terhadap informasi yang sama. Diskusi yang terbuka dan masukan dari pihak yang dapat dipercaya akan membantu dalam menilai relevansi dari informasi yang tersedia.

2. Konflik menyangkut Sumberdaya

Konflik menyangkut berbagai sumberdaya seperti tanah, uang atau benda lain biasanya mudah diidentifikasi dan sering diselesaikan lewat jalan tawar-menawar / negosiasi. Namun, kadang-kadang walaupun dipermukaan pihak-pihak yang berkonflik seolah saling mempertikaikan sumberdaya tertentu, tetapi sesungguhnya konflik itu menyangkut suatu perkara lain, mungkin tentang relasi atau kebutuhan psikologis salah satu atau kedua belah pihak

3. Konflik tentang Relasi

Dalam hubungan keluarga, kemitraan bisnis atau organisasi kemasyarakatan, orang sering berselisih pendapat tentang berbagai perkara, tetapi kadang-kadang saling ketergantungan yang tercipta oleh relasi mereka itu melahirkan dimensi destruktif pada aneka perbedaan yang terjadi yang semestinya mudah diselesaikan. Berbagai kejadian dimasa lampau atau kesan dan prasangka yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun dapat membuat orang menjadi sangat kaku atau tidak mau mencoba menempuh solusi yang sangat jelas yang berkaitan dengan tujuan, peranan, tanggung jawab, dan perbedaan pandangan yang ada.

4. Konflik menyangkut Kepentingan atau Kebutuhan

Aneka kebutuhan manusiawi yang penting dan kuat seperti kebutuhan akan jati diri, harga diri, atau partisipasi seringkali menjadi inti konflik yang di permukaan terkesan seperti persaingan menyangkut benda-benda materi belaka. Kesempatan yang konstruktif bagi individu atau kelompok masyarakat

untuk mengungkapkan aneka kebutuhan mereka dan merasakan bahwa diri mereka telah didengarkan seringkali amat menentukan dalam mengatasi jenis-jenis kebutuhan ini. Pemecahan jangka panjang terhadap suatu konflik yang berkisar pada sumberdaya seringkali ditentukan baik oleh penguasa aneka kepentingan atau kebutuhan orang-orang yang terlibat maupun oleh pembagian berbagai sumberdaya tersebut secara adil.

5. Konflik Menyangkut Struktur

Struktur kemasyarakatan dan organisasi menentukan siapa yang memiliki akses pada kekuasaan atau sumberdaya, siapa yang wajib memberi hormat kepada siapa, dan siapa yang memiliki wewenang untuk membuat berbagai keputusan. Konflik menyangkut atau di dalam struktur seringkali melibatkan persoalan tentang keadilan dan tujuan-tujuan yang saling tidak sejalan. Konflik-konflik semacam itu seringkali menuntut usaha bertahun-tahun untuk menghasilkan perubahan yang konstruktif.

6. Konflik Menyangkut Nilai-Nilai Hidup.

Berbagai nilai hidup dan keyakinan dibentuk oleh pengalaman hidup dan iman kepercayaan. Karena ancaman terhadap nilai hidup seseorang seringkali dipandang sebagai ancaman terhadap jati dirinya, maka konflik-konflik menyangkut nilai-nilai hidup biasanya paling sulit dipecahkan. Kebanyakan orang bereaksi secara defensif terhadap ancaman semacam ini dan menolak untuk bernegosiasi, mengira bahwa pemecahan konflik tersebut menuntut mereka untuk mengubah nilai-nilai hidup. Dalam kenyataan, dengan

memberi kesempatan kepada orang yang bertikai untuk menjernihkan nilai-nilai hidup mereka dan merasa bahwa mereka telah didengarkan serta dipahami seringkali langkah itu dapat membuat mereka meninggalkan sikap defensif dan belajar hidup bersama dengan saling menerima berbagai perbedaan yang ada di antara mereka.

Penetrasi Sosial, Kata penetrasi dalam Bahasa Inggris *penetration* berasal dari kata Latin *penetrare*, yang mengga bungkan *penes* (“*inside*“) dan *intrare* (“*to enter*“). Kata tersebut paling sering diartikan dengan menembus untuk menggambarkan masuk atau meresap. Penetrasi juga dapat berarti menguraikan atau memahami. Teori Penetrasi Sosial dipopulerkan oleh Irwin Altman & Dalmis Taylor. Teori penetrasi sosial secara umum membahas tentang bagaimana proses komunikasi interpersonal. Di sini dijelaskan bagaimana dalam proses berhubungan dengan orang lain, terjadi berbagai proses gradual, di mana terjadi semacam proses adaptasi di antara keduanya.

Penetrasi dalam arti kebudayaan dapat terjadi melalui dua cara, yaitu sebagai berikut;

Penetrasi Damai (*Penetration Pasifique*) Penetrasi damai artinya masuknya sebuah kebudayaan yang dilakukan secara damai, sehingga penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut tidak akan memunculkan konflik, justru sebaliknya akan memperkaya khazanah budaya masyarakat setempat. Selain itu, pengaruh kedua kebudayaan ini juga tidak

mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat. Misalnya yaitu masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia.

Penetrasi Paksa (Penetration Violence) Penetrasian paksa yaitu proses masuknya sebuah kebudayaan yang dilakukan secara paksa dan sifatnya merusak karena disertai dengan kekerasan, sehingga menimbulkan guncangan yang merusak keseimbangan masyarakat.

Contoh penetrasi damai misalnya adalah masuknya kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan. Penetrasi tersebut disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan guncangan-guncangan yang berakibat pada rusaknya keseimbangan dalam masyarakat. Wujud budaya dunia barat diantaranya yaitu budaya dari Belanda yang menjajah di Indonesia selama 350 tahun lamanya. Adapun budaya warisan dari Belanda masih melekat di Indonesia yaitu sistem pemerintahan Indonesia.

B. Konsep Dinamika Politik

Pada dasarnya, penyebab konflik politik dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Kemajemukan Horizontal, ialah struktur masyarakat yang majemuk secara kultur, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras serta majemuk secara sosial dalam perbedaan pekerjaan dan profesi. Adanya karakteristik dan keinginan dari masing-masing penghayat budaya, maka masyarakat seperti ini jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan

bersama, maka konflik ini akan menyebabkan disintegrasi sosial yang dipicu oleh perang sedarah atau gerakan separatisme.

2. Kemajemukan vertical ialah struktur masyarakat yang terpolarisasi secara hirarkis (dalam ketidak sederajatan) yang didasarkan pada perbedaan kekuasaan, kewenangan, pendidikan, dan kekayaan.

Secara umum, konflik politik dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu:

1. Konflik positif, yang dimaksud ialah konflik yang disalurkan dengan mekanisme penyelesaian konflik yang telah disepakati bersama, seperti lembaga-lembaga pemerintahan yang demokrasi seperti badan perwakilan rakyat, partai, politik, pemerintah, pengadilan dan pers, sehingga konflik tersebut tidak mengancam eksistensi system politik yang telah ada.
2. Konflik negative, ialah konflik yang disalurkan tidak melalui mekanisme politik yang telah disepakati bersama. konflik ini bisa terjadi jika masyarakat memandang bahwa lembaga dan struktur politik yang ada (lembaga demokrasi) tidak mencerminkan kepentingan mereka atau tidak aspiratif.
3. Pemilihan umum (disingkat Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain.

Pengertian lain Pemilu adalah salah satu upaya dalam mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melaksanakan aktivitas retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobi dan aktivitas lainnya. Morissan (2005:17) Pengertian pemilu menurut Morissan adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. UU nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) pengertian pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Prihatmoko (2003:19) Pemilihan umum didalam pelaksanaannya mempunyai tiga tujuan, yaitu:

1. Sebagai sistem kerja untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternative kebijakan umum (public polic)
2. Pemilu adalah sarana untuk pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang sudah dipilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, penggerak atau penggalang dukungan rakyat kepada Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil fungsi dari pemilu sebagai alat demokrasi yang dipakai untuk:

1. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
2. Adanya suatu masyarakat yang adil dan makmur menurut Pancasila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)
3. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru ,yakni tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

Bentuk pemilihan umum berdasarkan pelaksanaannya dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pemilihan langsung , adalah pemilihan yang dilakukan oleh pemilih dengan memilih secara langsung tanpa melewati lembaga perwakilan, pemilihan akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS)didaerah mereka untuk memberikan suara
2. Pemilu tidak langsung, yaitu pemilu yang dilaksanakan oleh para anggota perwakilan pada lembaga perwkilan atau pemilu yang tidak dilaksanakan oleh rakyat dengan langsung tetapi melewati lembaga perwakilan yaitu parlemen.Didalammemberikan suaranya, pemilih bisa secara langsung memilih dengan cara voting atau musyawarah mufakat sesuai kesepakatan.

Adanya distabilisasi sikap dan perilaku politik rakyat setiap kali pemilihan dilaksanakan, baik legislative, pemilihan presiden, dan pemilukada menyebabkan dinamika perilaku politik dalam proses pemilu. Ada beberapa

faktor yang mempengaruhi berubah-ubahnya perilaku memilih yaitu, perilaku elite politik local, politik primordial kekuasaan, konsep rakyat.

C. Kerangka Pikir

Telah dikemukakan bahwa konflik merupakan gejala serba hadir dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sedangkan proses politik sesungguhnya merupakan proses penyelesaian konflik dalam suatu masyarakat dalam pemilu. pada dasarnya, penyebab konflik politik dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu, kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertical.

Yang dimaksud dengan kemajemukan horizontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara cultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras, serta majemuk secara sosial dalam perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, tokoh agama (alim ulama), sopir dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik karena masing-masing unsure kultur tersebut memiliki karakteristik tersendiri.

Pemilihan Umum pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 dan sampai sekarang pemilu dilakukan sebanyak 12 kali yakni pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. pada pemilu serentak 2019 menghadirkan lima pemilihan sekaligus mulai dari Presiden-Wakil, DPR RI, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota dan DPD RI. Tapi pelaksanaannya diwarnai sejumlah persoalan.

Sejauh ini sedikitnya 16 petugas KPPS meninggal dunia. Jumlah korban terbanyak di Jawa Barat yang mencapai 12 orang. Adapun 4 lainnya di daerah Sulawesi Selatan. Hal lain, banyak pemilih kebingungan ketika harus memilih calon anggota legislatif lantaran informasinya tenggelam oleh pemilihan capres dan cawapres.

Diluar negeri banyak pemilih kehilangan hak suaranya karena durasi pemilihan yang terbatas. Berbagai masalah ini diakui oleh Direktur Jendral politik dan pemerintahan umum kementerian dalam negeri, Soedarmo.

Berdasarkan uraian diatas maka bagan kerangka konsep dapat digambarkan sebagai berikut:





Bagan. 2.1 oprasional kerangka fikir

D. Penelitian relevan

No.	Nama	Judul	Hasil	Tahun
1.	Ari ganjar hardiansa	Politisasi identitas dalam kompetensi di Indonesia pasca pemilu 2014	Identitas sementara menjadi komoditas politik yang digalirkan oleh para politikus dalam pertarungan pemilu di Indonesia. Tulisan ini menganalisis bagaimana politisasi identitas mengait pasca pemilu 2014 dan menjelaskan potensi-potensinya terhadap stabilitas dan integrasi bangsa. Data-data yang digunakan berasal dari kajian pustaka dan analisis berita-berita terkait dengan pemilu dan identitas, terutama pasca 2014. Tulisan ini mengungkapkan bahwa lemahnya institusionalisasi partai mendorong para politisi berkolaborasi dengan aktor-aktor civil society untuk memproduksi isu-isu identitas demi kepentingan pemilu.	2017
2.	Ihsan kamil	Peran panitia pengawas pemilu dalam upaya meminimalisasi konflik horizontal antar sesama pemilih kepala daerah/wakil kepala daerah di kabupaten Aceh Singkil (mendekatkan syasah syariah)	Tujuan penelitian ini, menganalisa peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil, menganalisis konflik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil, dan penulis ingin mengetahui bagaimana cara Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Singkil dalam mengatasi konflik horizontal dalam pemilihan Kepala Daerah.	2017
3.	Wahyu ngrobo	Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Indonesia	Pasca perubahan UUD 1945, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan pelaksana kekuasaan eksekutif dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Tujuan dari kajian politik hukum atas pelaksanaan pemilu dan pilkada ini adalah untuk membakukan penataan ulang politik hukum pemilu dan pilkada dalam mosaik ketatanegaraan Indonesia, kedevasaan dalam berpolitik, konsolidasi demokrasi lokal, dan perubahan pemikiran masyarakat daerah untuk menajukan daerahnya	2016

			yang sangat bergantung kepada figur pemimpinnya, serta terjaminnya hak-hak politik warga negara dalam konstelasi politik nasional maupun lokal. Adapun hasil dalam kajian ini adalah dituntutnya konsistensi penegakan hukum untuk taat terhadap sejumlah perangkat hukum pelaksanaan dan prosedur yang berbeda-beda dalam penyelenggaraan pemilu.	
4.	Moh Fajar Shodik Ranallin Tri Hendri Wahyudi	Pembinaan Pada Potensi Konflik dan Konstasi Serta Pemukada Kota Bitar: Analisis Instruksional dan Pilihan Rasional	Artikel ini membahas manajemen konflik pemukada di Kota Bitar menggunakan pendekatan kuantitatif pilihan rasional. Dengan asumsi bahwa lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu mempunyai kemampuan dalam manajemen konflik Kota Bitar dipilih karena mempunyai aspek yang unik dimana terdapat kandidat, yakni petahana dan perlawanan, tetapi dengan kontes yang bersifat sama. Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif eksploratif. Teknik penggalan data adalah dengan focus group discussion yang melibatkan lembaga-lembaga terkait pemukada di Kota Bitar. Melalui penelitian ini, diuraikan bahwa meskipun institusi terkait pemukada memahami potensi konflik, tetapi manajemen konflik yang dipilih adalah metode perbaruan.	2016
	Moh. Saibaniyandi dan Joni Kahrudin	Menakar profesionalisme penyelenggaraan pemilu 2014 di kota garam.	Perhatian terhadap manajemen sumber daya manusia (MSDM) penting dilakukan, sebagai antisipasi peningkatan pelayanan dan kesuksesan dalam penyelenggaraan pemilu legislatif 2014 di lingkungan kerja KPU Kabupaten Rembang. Bertolak dari asumsi inilah perlu melakukan beberapa pendekatan dalam rangka peningkatan kinerja KPU Kabupaten Rembang. Pertama, menakar profesionalisme dalam penanganan masalah-masalah	2015

			keperluan sepanjang tahun 2014. Kedua, melakukan upaya-upaya penerapan strategi penyelesaian masalah keperluan, melalui tiga aspek, yaitu aspek kepemimpinan, aspek integritas, dan aspek independensi.
6.	Astri puspita mambeni	Penetrasi konflik pasca pemilukada 2018 di kab. Sidrap (studi kasus dalam sosiologi konflik)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi pasca pemilukada 2018 di daerah sidrap adalah akibat dari muncul masyarakat yang memperbaharui eksistensi dirinya dari dirinya sendiri. Bentuk penetrasi konflik yang terjadi pasca pemilukada 2018 di daerah sidrap yaitu adanya faktor kekuatan kekinian yang dimaksud disini adalah (budaya keluarga) dan adanya kekuatan keperguruan dalam hal ini (budaya kerja).

Tabel.2.1 penelitian yang relevan



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan model atau desain penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa informasi lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati memperoleh fakta-fakta dan keterangan-keterangan secara factual mengenai penetrasi konflik pasca pemilukada dilihat dari faktor banyaknya konflik yang terjadi pasca pemilukada 2018.

Andi Prastowo, (2011:186) mengemukakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Oleh Suharsimi Arikunto, ditegaskan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variable, gejala, atau keadaan.

Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini tersusun dengan kelengkapan ilmiah yang disebut sebagai metode penelitian, yaitu cara kerja penelitian sesuai dengan cabang – cabang ilmu yang menjadi sasaran atau obyeknya. Cara kerja tersebut merupakan pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam upaya pencarian data yang berkenaan dengan masalah penelitian guna diolah, dianalisis, diambil berkenaan dengan masalah-masalah penelitian guna diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya.

Metode dalam suatu penelitian merupakan upaya agar penelitian tidak diragukan bobot kualitasnya dan dapat dipertanggung jawabkan validitasnya secara ilmiah. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Prof Dr Sugiyono, (2012:9) metode penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat dilapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika sistematis,

prinsip angka atau metode statistik pembicaraan yang sebenarnya, isyarat dan tindakan sosial lainnya adalah bahan mental untuk analisis kualitatif. Seperti halnya yang disebutkan oleh Lexy J. Moleong (2001:1), menjelaskan mengenai penelitian kualitatif, bahwa penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi “proses“ daripada “hasil”. Hal ini disebabkan oleh hubungan – hubungan bagian yang sedang di teliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Dengan penelitian kualitatif menghendaki di tetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif ini yaitu pendekatan fenomenologi. Alasan peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu untuk mendalami dan menggambarkan berbagai fenomena terkait konflik yang terjadi pasca pemilukada berlangsung. di Kabupaten Sidrap. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini, secara geografis terletak di provinsi Sulawesi Selatan kabupaten sidrap . Jarak tempuh lokasi penelitian berkisar 219 km dari rumah peneliti. Dengan waktu tempuh kurang dari 4 jam 6 menit.

C. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini ditentukan secara *snowball sampling* (bertujuan), Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap

terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Adapun informan penelitian ini antara lain:

1. Masyarakat yang terlibat saat pemilu/pilkada berlangsung.
2. Pihak Aparat yang mengamankan proses pilkada.
3. Masyarakat yang terkena konflik pasca pemilu/pilkada berlangsung..

Penelitian akan mengumpulkan data melalui informan diatas sesuai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Penentuan informan selanjutnya dilakukan secara *snowball sampling*. Artinya, aktor-aktor yang terlibat dalam menentukan orang-orang yang akan diwawancarai dari setiap aktor dilakukan secara snowball. Artinya, setelah penulis tiba di aktor yang telah ditentukan, penulis akan mencari tahu di lokasi tersebut siapa saja yang betul-betul memahami persoalan penyimpangan sosial di Kota Bontang.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Masyarakat, dengan mengetahui bagaimanakah konflik yang terjadi pasca pemilu di kalangan masyarakat Sulawesi selatan khususnya daerah sidrap. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka lokasi ini dirasa relevan dengan tujuan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrument penelitian yang digunakanlah instrumen penelitian berupa lembar observasi, panduan wawancara, dokumentasi dan peneliti itu sendiri sebagai pendukung dalam penelitian.

F. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada obyek. Untuk melengkapi data, maka melakukan wawancara secara langsung dan mendalam dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai alat pengumpulan data. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada masyarakat yang terlibat pada saat pemilukada berlangsung, pihak aparat yang bertugas mengamankan pemilukada.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang relevan dan data yang tidak secara langsung diperoleh dari responden, tetapi diperoleh dengan menggunakan dokumen yang erat hubungannya dengan pembahasan. Dalam hal ini penulis mengambil data observasi ke beberapa instansi dan kencocokan dengan wawan cara.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik penelitian dengan mendatangi lokasi penelitian, mengadakan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti khususnya pada objek dan subjek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab peneliti dengan subjek penelitian atau informan dalam suatu situasi sosial. Dengan memanfaatkan metode wawancara ini, maka penulis dapat melakukan penyampaian sejumlah pertanyaan kepada responden secara lisan dengan menggunakan panduan wawancara tiada lain untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal, baik yang berupa catatan yang berkenaan dengan judul penulis dan data dari responden atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti peneliti. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data, tiada lain untuk memperkuat kredibilitas data yang diperoleh.

d. Partisipatif

Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, baik keadaan fisik maupun perilaku yang terjadi selama berlansungnya penelitian. Pengamatan ini mempunyai maksud bahwa pengumpulan data melibatkan interaksi sosial antara peneliti dengan subjek penelitian maupun informan dalam suatu setting selama pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis tanpa menempatkan diri sebagai peneliti.

H. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, penjabaran kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang dipakai penulis adalah analisis data berlangsung atau mengalir (Flow Model Analysis). Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan pada teknik analisis data tersebut yaitu mengumpulkan data, reduksi data, display data dan verifikasi/menarik kesimpulan.

- a. *Data Reduction* (reduksi data), semua data yang diperoleh dilapangan akan ditulis dalam bentuk uraian secara lengkap dan banyak. Kemudian data tersebut direduksi yaitu data dirangkum, membuat kategori, memilih hal-hal yang pokok dan penting yang berkaitan dengan masalah. Data yang telah

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dari hasil wawancara dan observasi.

- b. *Data Display* (penyajian data), setelah melakukan reduksi data, peneliti selanjutnya melakukan tahap ke dua yakni penyajian data dimana data dan informasi yang sudah diperoleh di lapangan dimasukkan ke dalam suatu bentuk tabel.
- c. *Conclusion drawing/verification* (menarik kesimpulan/verifikasi) setelah penyajian data, peneliti kemudian menginterpretasi atau menyimpulkan data-data atau informasi yang telah di reduksi dan di sajikan.

I. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa atau memeriksa data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu, mengelompoknya, memilih dan memilah data lalu kemudian menganalisanya. Untuk memperkuat keabsahan data, maka peneliti melakukan usaha-usaha yaitu diteliti kredibilitasnya dengan melakukan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data atau menambah (memperpanjang) waktu untuk observasi. Wawancara yang awalnya hanya satu minggu, maka akan

ditambah waktu satu minggu lagi dan jika dalam penelitian ini, data yang diperoleh tidak sesuai dan belum cocok maka dari itu dilakukan perpanjangan pengamatan untuk mengecek keabsahan data. Bila setelah diteliti kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

b. Meningkatkan ketekunan

Untuk meningkatkan ketekunan, peneliti bisa melakukan dengan sering menguji data dengan teknik pengumpulan data yaitu pada saat pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara, maka peneliti lebih rajin mencatat hal-hal yang detail dan tidak menunda-nunda dalam merekam data kembali, juga tidak menganggap mudah/enteng data dan informasi.

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kepercayaan data (memeriksa keabsahan data atau verifikasi data) atau istilah lain dikenal dengan *trustworthiness*, yang digunakan untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang telah dikumpulkan.

1) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, maksudnya bahwa apabila data yang diterima dari satu sumber adalah meragukan, maka harus mengecek kembali ke sumber lain,

tetapi sumber data tersebut harus setara sederajatnya. Kemudian peneliti menganalisis data tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan dimintakan kesempatan dengan sumber-sumber data tersebut.

2) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu yang awalnya menggunakan teknik observasi, maka dilakukan lagi teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara kepada sumber data yang sama dan juga melakukan teknik dokumentasi.

3) Triangulasi peneliti

Triangulasi peneliti adalah membandingkan hasil pekerjaan seorang peneliti dengan peneliti lainnya (peneliti yang berbeda) tidak lain untuk mengecek kembali tingkat kepercayaan data dengan begitu akan memberi kemungkinan bahwa hasil penelitian yang diperoleh akan lebih dipercayai.

4) Triangulasi waktu

Triangulasi waktu adalah pengujian data yang telah dikumpulkan dengan memverifikasi kembali data melalui informan yang sama pada waktu yang berbeda.

BAB IV

GAMBARAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

Sesuai dengan lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti, maka pada bagian ini peneliti akan memaparkan secara singkat profil Kabupaten Sidrap sebagai wilayah atau lokasi peneliti mengadakan penelitian. Untuk itu jelasnya diuraikan sebagai berikut :

A. Sejarah Lokasi penelitian

Kabupaten Sidenreng rapping atau disingkat sidrap. Berdasarkan Lontara Mula Ri Timpakenna Tanae Ri sidenreng, menceritakan kisah seorang raja di Tanah Toraja bernama Sangalla yang memiliki Sembilan orang anak yang diberi nama La maddarammeng, La Wewanriru, La Togellipu, La Pasampoi, La Pakolongi, La Pababbari, La Panaungi , La Mampasessu, dan La Mappatunru.

Dari Sembilan anak raja yang paling tertua memiliki sifat mengintimidasi kedelapan adik-adiknya, bahkan daerah kerajaan adik-adiknya ia rampas. Tidak terima diperlakukan seperti itu merekapun sepakat untuk meninggalkan tanah toraja untuk berkelana.

Perjalanan yang jauh dan melelahkan membuat mereka mencari tempat beristirahat didekat danau . Namun, danau yang ingin mereka tempati berada di pedalaman hutan yang lebat dan harus melewati semak belukar dengan cara sirenreng-renreng (saling berpegangan tangan).

Karena tempat di dekat danau sangat strategis, mereka berdiskusi dan sepakat memulai kehidupan baru di tempat itu. Dan sekarang daerah itu dinamakan Sidenreng dari kata sirenreng-renreng.

Sidenreng rappaang asalnya terdiri dari dua kerajaan yang begitu akrab. Mulai dari dialek bahasa dan bentuk fisik menyebabkan sulit untuk mencari pembeda. Hanya saja dari letak geografis kerajaan yang satu di sebelah utara dan satunya lagi di selatan

System pemerintahan di kerajaan sidenreng bergelar addatuang. Yaitu segala keputusan berasal dari raja, pemangku adat dan rakyat. Sedangkan dari kerajaan rappaang bergelar Arung rappaang yang pengambilan kebijakan bersumber dari aspirai rakyat.

Pada saat pengakuan kedaulatan republic Indonesia oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949, berakhirilah dinasti kerajaan Sidenreng dan kerajaan Rappaang dan melebur menjadi kabupaten Sidenreng Rappaang dengan bupati pertama H. Andi Sapada Mapangile dan untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan Sidenreng Rappaang dilakukan pemilihan umum untuk memilih bupati secara langsung pada tanggal 29 Oktober 2008.

Eksistensi kerajaan ini turut memberi warna dalam percaturan politik dan ekonomi kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan. Sidenreng merupakan salah satu dari sedikit kerajaan yang tercatat dalam kitab La Galigo yang amat melegenda. Sementara masa La Galigo, menurut Christian Pelras yang menulis buku Manusia Bugis, berlangsung pada

periode abad ke 11 dan 13 Masehi. Ini berarti Sidenreng merupakan salah satu kerajaan kuno atau pertama di Sulawesi Selatan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, kewedanan Sidenreng Rappang yang meliputi Swapraja Sidenreng dan Swapraja Rappang dibentuk menjadi Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Pangkajene Sidenreng yang meliputi 7 (tujuh) wilayah kecamatan masing-masing :

1. Kecamatan Dua Pitue;
2. Kecamatan Maritengngae
3. Kecamatan Panca Lautang;
4. Kecamatan Tellu Limpoe;
5. Kecamatan Watang Pulu
6. Kecamatan Panca Rijang dan
7. Kecamatan Baranti.

Seiring dengan itu pula, terbit pula Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U. P. 7/73-374 tanggal 28 Januari 1960 yang menetapkan Andi Sapada Mappangile sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang yang pertama. Pada 18 Peberuari 1960, Andi Sapada Mappangile kemudian dilantik sebagai Bupati oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Atas dasar pelantikan Bupati tersebut, maka ditetapkan tanggal 18 Pebruari 1960 sebagai hari jadi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang diperingati setiap tahunnya.

Sejak itu berakhir sudah pemerintahan feodal para bangsawan To Manurung yang telah berlangsung berabad-abad. Namun yang jauh lebih penting adalah tumbuhnya rasa kebangsaan sebagai warga negara Indonesia yang memiliki persamaan hak dan derajat. Sejak terbentuknya hingga kini, Kabupaten Sidenreng Rappang telah dipimpin oleh putra-putra terbaik sebagai berikut:\

1. H. Andi Sapada Mappangile (1960 – 1966)
2. H. Arifin Nu'mang (1966 – 1978)
3. H. Opu Sidik (1978 – 1988)
4. H. M. Yunus Bandu (1988 – 1993)
5. Drs. A. Salipolo Palalloi (1993 – 1998)
6. HS. Parawansa, SH (1998 – 2003)
7. H. Andi Ranggong (2003 – Sekarang)

Sesuai dengan tuntutan perubahan dengan pertimbangan efektifitas pelaksanaan pemerintahan di era kepemimpinan HS. Parawansa, SH. ketujuh kecamatan dimekarkan menjadi sebelas sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. Masing-masing:

1. Kecamatan Panca Lautang;
2. Kecamatan Tellu Limpoe;
3. Kecamatan Watang Pulu;
4. Kecamatan Maritengngae;

5. Kecamatan Baranti;
6. Kecamatan Panca Rijang;
7. Kecamatan Kulo;
8. Kecamatan Sidenreng;
9. Kecamatan Pitu Riawa;
10. Kecamatan Dua Pitue;
11. Kecamatan Pitu Riase.

B. Keadaan Geografis Lokasi Penelitian

Kabupaten Sidrap terletak di diantara $30^{\circ}43'$ – $40^{\circ}09'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}041'$ – $120^{\circ}010'$ Bujur Timur. Kabupaten Sidrap terletak pada ketinggian antara 10 m – 3.000 m dari permukaan laut (Mdpl) dengan puncak tertinggi berada di Gunung Botto Tallu (3.086 Mdpl). Keadaan Topografi wilayah di daerah ini sangat bervariasi berupa wilayah datar seluas 879.85 km² (46.72%), berbukit seluas 290.17 km² (15.43%) dan bergunung seluas 712.81 km² (37.85%). Wilayah datar berada di bagian selatan dan barat. Wilayah perbukitan berada di bagian utara dan timur terutama di Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase. Di wilayah dataran rendah terdapat dua danau yaitu Danau Tempe dan Danau Sidenreng. Pada wilayah Kabupaten Sidrap, terdapat 38 sungai yang mengalir berbagai Kecamatan. Di Kecamatan Panca Lautang terdapat 6 (enam) aliran sungai sepanjang 33,75 Km, Kecamatan Tellu Limpoe dengan panjang 18 Km, Kecamatan Watang Pulu dengan panjang 39 Km,

Kecamatan Baranti dengan panjang 15 Km, Kecamatan Panca Rijang dengan panjang 19,55 Km, Kecamatan Kulo dengan panjang 25,7 Km, Kecamatan Maritengngae dengan panjang 5 Km, Kecamatan Dua Pitue dengan panjang 68,46 Km sehingga merupakan Kecamatan yang memiliki aliran sungai terpanjang di Kabupaten Sidrap.

Sedangkan di Kecamatan Pitu Riawa dengan panjang 7,5 Km. Sejumlah sungai besar yang ada di Kabupaten Sidrap antara lain Sungai Bila, Sungai Bulucenrana, Sungai Betao, Sungai Sidenreng, Sungai Bulete dan lainnnya.



Gambar 4.1 Peta lokasi kabupaten sidrap

C. Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan adalah salah satu unsure penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang di berbagai daerah pendidikan dijadikan sebagai alat untuk menaikkan derajat

seseorang. Berdasarkan data badan pusat statistic (BPS) sidrap tingkat pendidikan di daerah sidrap termasuk dalam kategori sedang . Hal ini disebabkan karena banyaknya penduduk yang mulai sadar akan pentingnya pendidikan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table penduduk menurut badan pusat statistic (BPS) sidrap:

Tabel 4.1 Banyaknya sekolah, ruang belajar, kelas, guru dan murid menurut jenis sekolah Negeri dan swasta tahun 2019

Jenis Sekolah	Sekolah	Ruang Belajar	Kelas	Guru	Murid
TK	152	271	351	684	8.010
SD	248	1555	1.570	2.761	32.896
SMTP	76	553	670	1.505	15.815
SMTA	34	282	374	1.201	11.070
Jumlah 2013	510	2.661	2.965	6.152	67.790
Jumlah 2012	499	2.659	2.847	5.705	66.048

Sumber: data bandan pusat statistic (BPS) sidrap 2015

Berdasarkan data table 4.1 monografi tersebut dapat diuraikan bahwa jumlahpenduduk yang tamat TK (taman kanak-kanak) sebanyak 8.010 murid, SD (sekolah dasar) sebanyak 32.896 murid, SMTP (sekolah menengah tingkat pertama) sebanyak 15.815 murid, dan SMTA (sekolah menengah tingkat akhir) sebanyak 11.070 murid. Dapat dikatakan bahwa pendidikan di kabupaten sidrap sudah cukup baik karena banyaknya sekolah yang telah dibangun untuk mensejahterakan penduduk. Dan dapat

juga dilihat dari banyaknya penduduk yang telah tamat sekolah mulai dari TK,SD SMTP, dan SMTA.

D. Keadaan penduduk berdasarkan tenaga kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan yang guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Untuk mengetahui jumlah penduduk yang bekerja dari data badan pusat statistic (BPS) sidrap dapat dilihat pada table 4.2.

Tabel 4.2 Komposisi penduduk berdasarkan tenaga pekerja

Kegiatan/	Laki-laki/	Perempuan/	Jumlah/
Type of Activity	<i>Male</i>	<i>Female</i>	<i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Usia Kerja	94 079	104 973	199 052
Bekerja	71 211	24 865	96 076
Penganggur Terbuka	5 300	2 630	7 930
Jumlah/ <i>Total</i>	76 511	27 495	104 006
Bukan Angkatan Kerj			
Sekolah	7 652	7 866	15 518
Mengurus Rumah Tangga	4.11	65 086	65 497
Lainnya	9 505	4 526	14 031
Jumlah/ <i>Total</i>	17 568	77 478	95 046

Sumber: data badan pusat statistic (BPS) sidrap 2015

Dari table diatas dapat dapat diketahui bahwa kebanyakan penduduk kabupaten sidrap adalah tenaga kerja dari berbagai macam pekerjaan dan sisanya pengangguran dan mengurus rumah tangga

Sebagian besar penduduk di kabupaten sidrap berprofesi sebagai petani yang sawahnya milik mereka sendiri.

E. Keadaan Sosial dan Budaya Lokasi penelitian

1. Keagamaan

Kehidupan beragama adalah salah satu bentuk toleransi yang ada di Negara Indonesia. Berbagai macam ras, suku dan budaya menyebabkan Negara Indonesia memiliki empat (4) agama yang di akui pemerintah. Untuk mengetahui jumlah penduduk di daerah sidrap berdasarkan agama yang dianut maka dapat dilihat dari table 4.3.

Tabel 4.3 jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut

Kecamatan	Islam	Keristen	Hindu	Budha	Jumlah
Panca lautang	20.766	44	57	2	20.869
Telu limpoe	17.065	63	10154	5	27287
Watang pulu	28.873	181	6813	38	35.905
Beranti	36.670	105	239	-	37.014
Panca rijang	33.732	66	36	2	33.836
Kulo	14.344	43	5	-	14.422
Maritenggae	55.607	479	1786	3	57875
Watang sidenreng	16.724	89	3579	1	20.393
Pituriawa	29.019	37	2117	-	31173
Dua pitue	32.744	20	1635	4	34403
	24.887	46	278	-	25.211
Jumlah	310.461	1.173	26.699	55	338388

Sumber: data badan pusat statistic (BPS)

Berdasarkan dari data table di atas kebanyakan penduduk didaerah sidrap menganut agama islam yaitu sebanyak 310.461. sisanya yaitu agama Kristen yaitu sebanyak 1.173, agama hindu sebanyak 26.699 dan agama buddah sebanyak 55 orang.

2. Kemiskinan

Angka kemiskinan masyarakat di Provinsi Sulsel tidak mengalami penurunan secara signifikan untuk tahun 2016 lalu. Sulsel sebagai salah satu provinsi di Indonesia masih memiliki angka kemiskinan sebesar 9,24 persen dari total kurang lebih 8 juta masyarakat di Sulsel. Dari angka tersebut, informasi yang diperoleh dari Pemprov Sulsel menyebutkan Kabupaten Sidrap masih menjadi sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan rendah di Sulsel.

Dan sebagai kabupaten yang paling rendah angka kemiskinannya di Sulsel, Sidrap masih bertahan sebagai juara pertama. Dari angka kemiskinan 5,5 persen turun satu poin menjadi 5,4 persen dari jumlah penduduk berkisar 280 ribu jiwa.

Sekadar diketahui, Sidrap memang memiliki angka persentasi kemiskinan paling rendah di Sulsel untuk tingkat kabupaten se Sulsel. Untuk 2014 lalu hanya 5,8 persen, 2015 5,5 persen dan turun lagi 5,4 persen. (sumber: BPS Sulsel:2016)

3. Kesehatan

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan, dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan, dan persalinan. Untuk mengetahui angka jumlah penduduk daerah kabupaten sidrap yang mengalami gizi buruk dapat dilihat dari tabel 4.4.

Tabel.4.4 jumlah penduduk gizi buruk

Jumlah Kasus Gizi Buruk	Jumlah Kasus Gizi Buruk (Jiwa)				
	2011	2012	2013	2014	2015
	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
Jumlah Kasus	26	21	10	15	2

Sumber: data dari badan pusat statistic daerah Sidrap: 2017

Dari data badan pusat statistic sidrap (BPSS) yang di peroleh penulis daerah kabupaten sidrap memiliki data kesehatan yang cukup baik dilihat dari tabel gizi buruk dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami penurunan dari 26 jiwa di tahun 2011 menurun ke 2 jiwa pada tahun 2015.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Laporan hasil penelitian ini akan membahas tentang mekanisme maupun proses penetrasi konflik pasca pemilu pada 2018 di kabupaten Sidrap. Secara khusus terdapat permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan laporan hasil penelitian ini yaitu: Bagaimana dinamika konflik pasca pemilu pada 2018 di kab. Sidrap. Dengan demikian setelah pembahasan pokok permasalahan tersebut kita dapat mengetahui dan memahami bentuk penetrasi konflik pasca pemilu pada 2018 di kab. Sidrap.

Namun sebelum peneliti membahas lebih lanjut ke pokok permasalahan tersebut di atas, peneliti terlebih dahulu memaparkan mengenai. Selain kronologi konflik pada saat pemilu pada 2018 tersebut.

Adapun susunan isi dari hasil penelitian tentang “ penetrasi konflik pasca pemilu pada di kabupaten Sidrap”. Adalah sebagai berikut:

1. Dinamika konflik pada saat pemilu pada 2018 di daerah Sidrap.
2. Bentuk penetrasi konflik pasca pemilu pada 2018 tersebut.

a. Dinamika konflik pasca pemilu pada

Masyarakat Indonesia yang multicultural, multiras, dan multi agama memiliki potensi yang besar untuk mengalami konflik antara kelompok, ras, agama, dan suku bangsa. Didalam system sosial terdapat masalah yang menyangkut kekuasaan, wewenang, dan pemerintahan.

Konflik politik adalah pertentangan yang terjadi dalam masyarakat karena perbedaan pendapat atau ideology yang dianut oleh masing –masing kelompok. Misalnya, pertikaian antara kaum penjajah dan pribumi, pertentangan antara dua partai politik dan antara pemerintah dan rakyat.

Konflik yang sering terjadi di Indonesia terkhusus diberbagai daerah ialah konflik pemilukada. Konflik lintas partai politik dalam pembentukan pemerintahan dimana hasil pemilihan tidak ada peserta pemilihan yang menang mutlak sehingga untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan tidak mudah goyah diperlukan adanya koalisi lintas partai. Dalam hal ini, semula antarpolitical terjadi konflik dalam memperebutkan suara dari konstituen.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lokasi penelitian terkait dengan tujuan penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi ditemukan beragam informasi, baik itu berupa data primer maupun data sekunder sebagai bahan untuk dianalisis menjadi hasil penelitian.

Adapun informasi dan data yang ditemukan peneliti dalam bentuk wawancara dengan informan di lapangan/lokasi penelitian. Seperti yang diungkap oleh bapak ML yang bekerja sebagai PNS di kantor bupati Sidrap.

“ waktu maunya orng pemilihan bupati 2018 kemarin, banyak tim sukses dari kubu 1 dan 2 pergi mencari suara di keluarga-keluarganya, termasuk saya saya tidak bisa terima. Apalagi kalau dia menjelek-jelekan pilihan saya dan membangga-banggakan pilihannya disitu yah saya tidak sependapat” (ML)

Dari hasil wawancara dengan bapak ML yang menjelaskan bahwa konflik yang terjadi pada saat itu ketika keluarganya sendiri datang menemui dirinya dengan pilihan yang berbeda sehingga terjadi perbedaan pendapat antara bapak ML dan keluarganya.

Hal serupa juga di alami oleh bapak AR, perbedaan pilihan antara calon bupati 01 dan 02 yang terjadi di dalam keluarga juga dialami dilingkungan tempat tinggalnya. Dari hasil wawancara penulis dan informan terungkap bahwa:

“kalau malam mih itu dibawah rumahku waktu mau pemilihan bupati orang di sidrap banyak mih itu tetangga datang cerita sambil main gaplek. karena sudah didatangi rumahnya sama tim sukses dari calon 01 dan 02 banyak mih itu dijanjijanji, nah saya juga ikut mka cerita calonku nah biasa baku geaka kalau tidak mau dikalah padahal ditau ji juga kapasitasnya calon bupati”(AR).

Selain itu wawancara dengan mahasiswa MA yang kebetulan pada saat pemilukada berlangsung menjadi salah satu saksi di TPS tempat pencoblosanya mengungkapkan:

“ Ada temanku baku bombe sama sepupunya karena tidak sama pilihann padahal sering jalan sama nah kalau pergimih kumpul komunitas motor dipangkajenne selalu sama-sama, tapi sudahnya nah tau bilang lain nah pilih sepupunya tidak mau mih nah omong”(MA)

Tidak hanya pada keluarga terdekat seperti wawancara diatas, konflik pemilu juga terjadi pada kalangan pelajar seperti yang diungkapkan IM:

“banyak dari temanku yang jadikan ini taruhan karena bisa tambah-tambah uang jajan. Tapi jeleknya itu waktunya kalah kemarin calonnya ada yang marah waktunya ditagih terus juga ada temanku sampai nah putuskan ki pacarnya gara-gara taruhan”.(IM)

Perbedaan pendapat yang terjadi pada saat pemilukada berlangsung menjadi salah satu pemicu konflik antara keluarga. Konflik yang terjadi ketika tujuan, kebutuhan dan nilai-nilai kelompok serta individu yang bersaing bertabrakan dan akibatnya menjadi agresif walaupun belum tentu berbentuk kekerasan fisik.

Konflik juga terjadi tidak hanya pada saat proses pemilihan berlangsung. Setelah pemilihan antara calon bupati 01 dan 02 terselenggarakan. Konflik masih saja terjadi di daerah sidrap. Dilihat dari wawancara penulis bersama informan MIN diungkapkan bahwa:

“setelah orang macoblos bupati, perhitungan suara di TPS dilaksanakan dan disaksikan banyak orang, disekeliling saya banyak yang berkomentar kenapa bisa sedikit suaranya calon bupati 01, nah disini sudah jelas adalagi provokator untuk memecah belah warga padahal sudah dipastikan bersama itu kerta dikasih keluar dari kotak suara” (MIN)

Kebanyakan dari warga mendatangi kantor KPU kabupaten sidrap untuk memastikan bahwa calon bupati yang dipilih tidak gagal. Dikarenakan banyak yang tidak terima atas kekalahan yang dialaminya serta provokator dari pihak-pihak yang mengambil keuntungan.

Bukan hanya mengenai perhitungan suara, konflik terjadi didaerah sidrap. Setelah Bupati yang dipilih naik menjabat. Diungkapkan oleh ibu IY bahwa:

“ada teman saya yang menjadi kepala sekolah di salah satu SD di kecamatan pituriwa dimutasi cukup jauh jaraknya dari sekolah yang dulu dikarenakan tidak memilih bupati yang menjabat saat ini. teman saya juga sempat marah ke kekeluarganya karena minta diusruskan pindah tapi tidak bisa ”. (IY)

Sama halnya dengan teman IY informan MY juga mengalami kejadian setelah pemilihan umum berlangsung diungkapkan bahwa:

“banyak tender yang kemarin telah dijanjikan ke saya ketika calon bupati yang saya pilih akan naik tapi ini menang tapi diluar ekspetasi ternyata pilihan saya tidak naik, jadinya saya kekurangan banyak tender dan sulit mendapatkan tender” (MY).

Dari wawancara diatas bahwa setelah pemilihan bupati berlangsung terdpat konflik yang terjadi. Pada awalnya banyak orang yang berpihak di calon bupati yang tidak terpilih dikarenakan anggapan kalau calon Bupati nya akan tetap sama. Ternyata diluar dugaan bahwa bupati yang terpilih adalah pasangan no 02. Banya ketidak sesuaian mengakibatkan konflik yang terjadi di dunia kerja menyebabkan kesenjangan sosial.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan padasalah satu aparat yang mengamankan. Bahwa peran aparat sangat dibutuhkan seperti yang diungkapkan AY:

“ Saya selaku aparat yang menegakkan hukum pada saat tugas mengamankan pemilihan bupati kemarin dan juga bersama teman-teman, Alhamdulillah masih bisa mengamankan dan membuat keadaan tetap kondusif, meskipun banyak kesulitan namanya pekerjaan kita yah sudah resikoan”.

Seperti percakapan wawancara dengan AY bahwa peran aparat selaku penegak hukum untuk mengamankan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sangat penting. Selain itu sikap yang di tujukan warga terhadap aparat juga tidak terlalu menyusahkan.

Bukan hanya aparat yang memiliki peran penting dalam pemilihan bupati 2018, masyarakat juga memiliki peran penting selama pemilihan berlangsung tidak memprovokasi dan menerima kekalahan juga menjadi cara yang baik untuk menjaga ketertiban masyarakat..

Selain peran aparat dalam mendamaikan dan menjaga keutuhan rakyat masyarakat juga banyak menyikapi tentang pemilu pada 2018 seperti yang diungkapkan AM:

“ karena pada kita jih sebenarnya bahu keluarga, saya sendiri tidak terlalu bagai mana sekali jih masalah pemilihan bupati kah kalau bilang mih keluargaku ini yang baik ikut mka itu, tapi sebenarnya karena saya tidak enak kalau mau berkelahi karena pilihan jih, jadi saya berusaha untuk tetap tenang dan juga saya orangnya cinta damai”.(AM)

Berdasarkan wawancara diatas masyarakat seperti AM lebih memilih untuk tetap tenang dalam menyikapi pemilu pada yang telah berlalu itu. Dengan prinsip

yang dia pilih Cinta dengan kedamain menjadi salah satu faktor untuk tidak memunculkan konflik.

b. Bentuk Penetrasi konflik pasca pemilukada

Perubahan sosial dengan konflik terdapat hubungan karena perubahan sosial dapat terjadi akibat konflik sosial dan sebaliknya. Konflik sebagai proses sosial akan selalu berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat karena masyarakat bersifat dinamis. keberadaan seseorang dalam kelompok memiliki dinamika sebagai pengaruh dari konflik sosial. Pengaruh dari konflik sosial bisa bersifat positif maupun negative.

Konflik sosial dapat bersifat negative apabila pertentangan yang terjadi tidak dapat di selesaikan secara damai atau menimbulkan diintegrasikan sedangkan konflik yang positif kalau saja konflik bisa diselesaikan dan memiliki perbaikan untuk system sosial.

Teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf, bahwa dalam suatu perubahan pada hakikatnya masyarakat memiliki dua sisi: konflik disatu pihak, dan stabilitas, harmoni, serta consensus dipihak lain.

Seperti masyarakat di daerah kabupaten sidrap yang sempat mengalami dilematika pemilihan umum pasca pemilukada 2018 memiliki dua sisi yang harus diteriima mau tidak mau. Adanya interaksi yang terjalin selama pemilihan bupati berlangsung mengakibatkan integritas dan terciptanya berbagai solidaritas.

Apabila hasil dari komunikasi tersebut mengubah penilaian dari masing-masing yang berkonflik, konflik akan segera berakhir. Adapun solusi yang ditawarkan oleh salah satu informan yang dikemukakan oleh AA yaitu:

“ kalau saranku saya mungkin lebih Kediri individunya saja masing-masing jangan terlalu muda terprovokasi atas apa yang belum tentu kebenarannya, karena saya sendiri juga tidak mudah percaya dengan orang lain”.

Sama dengan AA solusi lain juga ditawarkan oleh informan AAD mengungkapkan bahwa:

“ kalau sosusi dari saya untuk menurunkan konflik itu dengan bernegosiasi bukan dengan cara saling berdebat, dan juga lebih baik diam daripada soktau dan menyebabkan pertikaian”.

Berdasarkan wawancara penulis dan informan AA dan AAD maka dapat disimpulkan bahwa solusi yang tepat untuk meredakan konflik dengan cara, bernegosiasi dan tidak memiliki sifat menag sendiri.

B. Pembahasan

1. Dinamika konflik pasca pemilukada

Dinamika adalah suatu hal yang bersifat berkemampuan atau bertenaga, serta selalu bergerak dan berubah-ubah (Idrus:1996). Dan menurut (Kartono:2007) dinamika adalah suatu bentuk perubahan , baik itu yang sifatnya besar-besaran atau kecil-kecilan, maupun secara cepat atau lamabat, yang sifatnya nyata dan berhubungan dengan suatu kondisi keadaan.

dinamika sosial berarti bahwa manusia dan masyarakat selalu

berkembang serta mengalami perubahan. Perubahan akan selalu ada dalam setiap kelompok sosial. Ada yang mengalami perubahan secara lambat, maupun mengalami perubahan secara cepat (Soejono soekanto,2006:146).

Telah dikemukakan bahwa konflik merupakan gejala serba hadir dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara , sedangkan proses politik sesungguhnya merupakan peroses penyelesaian konflik dalam suatu masyarakat dalam pemilihan kepala negara pemerintah dan jajarannya. . pada dasarnya, penyebab konflik politik dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu, kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertical.

Yang dimaksud dengan dengan kemajemukan horizontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara cultural, seperti suku bangsa , daerah, agama, dan ras, serta majemuk secara sosial dalam perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, tokoh agama(alim ulama), sopir dan cendikiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik karena masing-masing unsure kultur tersebut memiliki karakteristik tersendiri.

Seperti konflik yang terjadi di daerah kabupaten sidrap , yang pemicunya dari keluarga yang memprovokatori, Dan tidak bisa mengalah alias egois. Adanya dorongan untuk bersaing dan tidak mau nengalah yang dimiliki individu maupu kelompok untuk mencapai tujuan dapt menyebabkan konflik.

Perbedaan pendapat dilingkungan keluarga juga menjadi salah satu faktor pada konflik pasca pemilukada, timbulnya kesenjangan sosial antara penduduk, dan warga tidak dapat menciptakan harmonisasi yang baik bagi suatu daerah.

Konflik adalah proses disosiatif dalam interaksi sosial yang terjadi ketika semua pihak dalam masyarakat ingin mencapai tujuannya dalam waktu bersamaan. Konflik juga menyebabkan terjadinya interaksi padatan yang lebih serius dari sekedar kompetisi dan kerja sama, pada dasarnya saling berkaitan. Konflik terjadi ketika tujuan, kebutuhan, dan nilai-nilai kelompok-kelompok yang bersaing bertabrakan sehingga terjadi agresi walaupun belum tentu berbentuk kekerasan. (Schelling, 1960).

2. Bentuk penetrasi konflik pasca pemilukada 2018 di kabupaten Sidrap

Perubahan sosial dengan konflik terdapat hubungan karena perubahan sosial dapat terjadi akibat konflik sosial dan sebaliknya. Konflik sebagai proses sosial akan selalu berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat karena masyarakat bersifat dinamis. Keberadaan seseorang dalam kelompok memiliki dinamika sebagai pengaruh dari konflik sosial. Pengaruh dari konflik sosial bisa bersifat positif maupun negatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti yang sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti mendapatkan bentuk penetrasi konflik dari pasca pemilihan bupati 2018 yang telah berlalu. Bentuk pertama yaitu konflik sosial tidak semestinya selalu negatif, karena dalam konflik selalu terkandung

dampak positif yaitu kepentingan untuk mencapai tujuan pribadi, apabila tujuan tersebut berbeda dengan orang lain, dan selanjutnya kepentingan bersama, untuk memelihara hubungan baik sehingga diperlakukan kemampuan bekerja sama secara efektif dengan orang lain.

Konflik sosial bersifat negative apabila pertentangan yang terjadi tidak bisa di selesaikan. Sedangkan yang bersifat positif jika dapat diselesaikan secara damai dan berakhir dengan perbaikan. Berkaitan dengan penanganan konflik, menurut Like Wilardjo (1990) terdapat tiga mantara perdamaian, yaitu yang pertama keamanan, jika tegasnya keamanan dalam negeri, yang kedua Kedamaian, mengacu kepada keamanan regional atau internasional dalam hubungan antarbangsa, ketiga ketentraman jika suasana dari perseorangan dan masyarakat bebas dari kekhawatiran terhadap pelanggaran haknya oleh pihak lain.

Teori konflik yang dikemukakan Ralf Dahrendorf, bahwa dalam suatu perubahan masyarakat memiliki dua sisi, yaitu konflik di satu pihak, stabilitas, harmoni serta consensus di pihak lain. Dalam hal ini konflik yang terjadi dapat disebabkan oleh sistem dalam struktur sosial tertentu, dengan kata lain konflik yang timbul berkaitan dengan kedudukan sosial dan masyarakat.

Dari hasil wawancara terkait bentuk penetrasi konflik pasca pemilu pada 2018 di daerah kabupaten Sidrap penulis dapat menyimpulkan bahwasanya bentuk penetrasi konflik lebih bersifat subjektif, walaupun ada sebab objektif yang menyebabkan suasana yang tidak enak dan saling curiga

namun dapat ternetralisir dengan seiring berjalannya waktu. Bentuk penetrasi konflik yang terjadi pasca konflik pemilukada 2018 di kabupaten sidrap yaitu, kekuatan kultur (hubungan keluarga). Dan kekuatan kepentingan (hubungan kerja).

Kekuatan kultur (hubungan keluarga), Dibutuhkan peran serta seluruh anggota keluarga untuk mengatasi konflik yang sedang terjadi. Adapun untuk menyelesaikan konflik dengan baik, dibutuhkan komunikasi dalam keluarga agar masing-masing anggota dapat terbuka satu sama lain. Milikilah pikiran yang terbuka dengan mendengarkan pendapat anggota keluarga lainnya.

Kekuatan kepentingan (hubungan kerja) konflik di tempat kerja bisa membuat para pegawai di tempat kerja merasa stres dan berujung pada performa yang tidak maksimal. Adanya persamaan tujuan yang ingin dicapai maka pihak yang memiliki jabatan rendah harus patuh kepada yang tinggi alias bos. Untuk meredam konflik yang ada di dunia kerja sifat mau menang sendiri. Adanya hhubungan kerja menyebabkan bnyak bantuan dri teman-teman.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinamika konflik yang terjadi di daerah kabupaten Sidrap ini ternyata dilatar belakangi oleh faktor sebagai berikut: adanya perbedaaan yang sulit ditolelir antara pihak-pihak berkepentingan di arena demokrasi. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperjelas suatu masalah yang terjadi juga menjadi salah satu faktor konflik yang terjadi. Tidak adanya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kejujuran dan sikap apatis yang dimiliki dapat menimbulkan konflik.

Bentuk penetrasi konflik yang terjadi pasca pemilukada 2018 di daerah sidrap menurut penelitian yaitu adanya faktor kekuatan kultur yang dimaksud disini adalah hubungan keluarga. Dimana anggota keluarga Yang sangat utama ialah memikirkan hubungan dengan orang lain yang terlibat. Bijak dalam berfikir adalah penentu kepada kejayaan bagi menyelesaikan konflik. Faktor selanjutnya yaitu adanya kekuatan kepentingan dalam hal ini (hubungan kerja) . berbagai kepentingan yang dimiliki individu untuk melangsungkan kehidupan dan menaikan status sosial. Mengharuskan individu meredam konflik .

B. Saran

Peristiwa ataupun konflik yang terjadi pasca pemilukada 2018 di kabupaten sidrap telah memberikan pelajaran bagikita semua, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah sidrap itu sendiri, seharusnya lebih memperhatikan nilai-nilai kejujuran dan tidak bersikap individualis. Begitupun dengan pihak pemerintah agar lebih memperbaiki system demokrasi bagi rakyat agar dapat meminimalisir konflik yang dapat terjadi akibat pemilukada. Sebab pemerintah merupakan pelayan masyarakat, pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab mengurus dan mensejahterakan rakyat dan menciptaka perdamaian.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil & Adang. *Sosiologi Untuk Universitas. Bandung*: PT Refika adiyatma, 2013
- Emzir,2015:2017. *Metodologi Penelitian pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*.Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Griffin, Emory A., *A First Look at Communication Theory, 5th edition*, New York: McGraw-Hill, 2003, page 132—141
- Gerungan,W.A1996. *psikologi sosial*.Bandung:Eresco.
- Idrus.1996. *Pengertian Dinamika* (online). ([http:// www .definisi menurut para ahli.com](http://www.definisi menurut para ahli.com) , diakses 21 juni 2019)
- Kartono,2007. *PengertianDinamika* (online). ([http:// www. Definisi menurut para ahli .com](http://www.Definisi menurut para ahli .com) , diakses 21 juni 2019)
- Marx, Karl & Friedrich .1884. *Teori konflik*. Communist Manifesto.
- Noeng, Muhajir. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Rake Sarasin.
- Parson,Jorgensen, dan Hernandes.1994. *The Integration of social work partice*.california: Wardsworth Inc.
- Prihatmoko(2003:19) *Tujuan pemilihan umum* (online). (<http://blog.unnes.ac.id>, diakses 21 juni 2019)
- Prastowo.Andi (2011:186).*metode penelitian*.(online). (<http://Empirits.uny.ac.id>
- Ritzer, George. 2010. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta : Rajawali Press
- Rusdiana. A, 2015. *Menejemen konflik*. Bandung:CV Pustaka setia.
- Sarlito.W. Sarwono.1999; *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta : Bulan Bintang, hlm.145
- Sockanto, Soerjon.1982. *Teori Sosiologi: Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Undang- undang No. 32 Tahun 2004
- Undang- undang No. 15 Tahun 2011
- Wirawan, Ida Bagus,*Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012

Sumber Internet:

<https://docobook.com/jurnal-konflik-pilkada-dalam-era-demokrasi-ilmu-administrasi.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik#Konflik_Menurut_Robbin

<https://mapcorner.wg.ugm.ac.id/2017/02/memahami-konflik-pasca-pemilukada/>



2	AN	28
3	AM	
4	EM	
10	AY	
11	AD	

ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Identitas Informan

1. Identitas informan

a. Umur

Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam proses pengambilan peran, memperoleh informasi atau berbagai pengalaman dan pengambilan keputusan dalam lingkungannya. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di kabupaten sidrap, maka diketahui umur informan bervariasi yaitu 48,44,30,28,26,25,23. Usia informan yang paling muda adalah 23 tahun dan yang paling tua adalah 48. Jumlah informan yaitu 10 orang, seperti yang terlihat pada table berikut ini yang berinisial AR, MIN, MY, AA, ML, MA, AM, IY, IM, dan AT.

Tabel. Distribusi informan menurut umur

No	Nama	Umur
1	ML	48
2	IY	44
3	AR	30
4	MIN	28
5	MY	26
6	MA	25
7	AA	25
8	AM	23
9	IM	22
10	AY	26
11	AAD	23

Sumber: Data wawancara di kabupaten sidrap. 2019

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di kabupaten sidrap, maka peneliti dapat mengetahui jumlah informan yang diteliti yaitu berjumlah 10 orang sebagai sampel penelitian .

b. Jenis kelamin

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ML	L
2	IY	P
3	AR	L
4	MIN	L
5	MY	L
6	MA	L
7	AA	L
8	AM	L
9	IM	L
10	AY	L
11	AAD	P

Sumber: data wawancara di kabupaten sidrap 2019

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari table diatas terdapat 10 informan yang diwawancarai maka penulis dapat mengetahui jenis kelamin dari masing-masing informan, bahwa terdapat 9 (sembilan) informanyang berjenis kelamin laki-laki yaitu informan ML,AR, MIN, MY, MA, AA, AM, IM, AY serta 2 (perempuan) informan yang berjenis kelamin perempuan IY dan AAD.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting bagi seseorang dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pendidikan akan memberikan pengaruh pada pola pikir seseorang dalam menjalankan aktivitas kehidupannya

sehari-hari. Setiap peningkatan sumber daya manusia , tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan data yang diperoleh langsung dari para informan peneliti maka tingkat pendidikan dan pekerjaan informan akan penulis paparkan dalam table berikut:

Table. Distribusi informan menurut pendidikan pengolahan

No	Nama	Pendidikan	Pekerjaan
1	ML	SI	PNS, Bertani
2	IY	SI	PNS, IRT
3	AR	SI	PNS
4	MIN	SI	PNS
5	MY	SI	PNS
6	MA	SMA	Honorer, Mahasiswa
7	AA	SMA	Honorer, Mahasiswa
8	AM	SMA	Bertani
9	IM	SMA	Mahasiswa
10	AY	SMA	Brimob
11	AAD	SI	Pengangguran

Sumber: data wawancara dikabupaten sidrap 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tingkat pendidikan informan yaitu lorong informan berpendidikan S-I sebanyak 6 (enam) orang dan sebanyak 5 (lima) orang adalah mahasiswa atau tamatan SMA.

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana proses konflik yang terjadi pada saat pemilukada berlangsung?
2. Apakah setelah pemilukada berlangsung terdapat konflik di daerah sidrap?
3. Apa saja konflik yang terjadi di daerah sidrap setelah pemilukada 2018 berlangsung?
4. Apa peran anda selama pemilukada 2018 berlangsung?
5. Bagaimanakah anda menyikapi apabila ada konflik yang terjadi setelah pemilukada berlangsung?
6. Solusi apakah yang paling tepat untuk mengatasi konflik pasca pemilukada 2018?



DOKUMENTASI



Gambar kantor lurah lancirang Kabupaten Sidrap.



Gambar wawancara bersama responden.



Gambar Wawancara bersama responden



Gambar administrasi pengurusan surat penelitian



Gambar wawancara bersama aparat kepolisian.



120191914211901

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 21601/S.01/PTSP/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Sidrap

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2977/05/C.4-VIII/VIII/37/2019 tanggal 09 Agustus 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ASTRI PUSPITA MANDASARI**
Nomor Pokok : 10538 327115
Program Studi : **Pend. Sosiologi**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
Alamat : **Jl. Sri Alauddin No. 259, Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENETRASI KONFLIK PASCA PEMILUKADA 2018 DI KABUPATEN SIDRAP (SUATU KAJIAN DALAM SOSIOLOGI KONFLIK) "

Yang akan dilaksanakan dari : **Tgl. 14 Agustus s/d 14 Oktober 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 14 Agustus 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Terdusun Yth:

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. Peringkat!

SIMP PTSP 14-08-2019



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sdsulprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 647/IP/DPMPSTSP/8/2019

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **ASTRI PUSPITA MANDASARI** Tanggal **30-08-2019**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor **21601/S.01/PTSP/2019** Tanggal **14-08-2019**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **ASTRI PUSPITA MANDASARI**

ALAMAT : **JL. MINASA UPA BLOK D, KEC. RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

JUDUL PENELITIAN : **PENETRASI KONFLIK PASCA PEMILUKADA 2018 DI KAB. SIDRAP (SUATU KAJIAN DALAM SOSIOLOGI KONFLIK)**

LOKASI PENELITIAN : **KELURAHAN LANCIRANG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **14 Agustus 2019 s.d 14 Oktober 2019**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 30-08-2019



Biaya : Rp. 0.00

Tembusan :

1. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2. LURAH LANCIRANG
3. PERTINGGAL

SURAT KETERANGAN

Nomor: 56 / LCR PR / 011 / 2019.

Assalamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi bagi mahasiswa tahap akhir penyelesaian studi dilingkup Universitas Muhammadiyah Makassar, maka saya yang bertandatangan di bawah ini:

- a. Nama : A. MUETI ALI, SE. M. Adm. Pemb
- b. Jabatan : LURAH LANCIKANG
- c. Instansi : KANTOR KELURAHAN LANCIKANG

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama mahasiswa : ASTRI PUSPITA MANDASARI
- b. Nim : 105 38 32 7115
- c. Institusi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
- d. Jurusan : PENDIDIKAN SOSIOLOGI
- e. Judul penelitian : PENETRASI KONFLIK PASCA PEMILIKADA 2018 DI KAB SIDRAP
- f. Lokasi penelitian : (SUATU KAJIAN DALAM SOSIOLOGI KONFLIK) LANCIKANG, KAB SIDRAP.

Sesuai dengan judul penelitian diatas, maka saya tidak merasa keberatan apabila mahasiswa yang bersangkutan melaksanakan penelitian selama 2 (dua) bulan di instansi kami.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu Alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sidrap, 29 Agustus 2019

Mengetahui


A. MUETI ALI, SE. M. Adm. Pemb
(.....18741234.200412) 1 097



RIWAYAT HIDUP



Astri Puspita Mandasari. Dilahirkan di Provinsi Papua kabupaten Jayapura pada tanggal 29 Maret 1997. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Drs. Sudirman dan Ramlah S.Pd. Peneliti pertama kali masuk pendidikan formal di SDYPKP 1 Sentani pada tahun 2003 dan tamat di SDN 4 Lancirang Kabupaten Sidrap.

Pada tahun yang sama (2009) peneliti melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 4 Dua Pitue Kabupaten Sidrap dan tamat pada tahun 2012. Setelah tamat SMP ditahun 2012, peneliti melanjutkan pendidikan ke SMA negeri 1 Dua Pitue Kabupaten Sidrap dan tamat tahun 2015. Dan ditahun yang sama (2015) peneliti terdaftar sebagai mahasiswi di Universitas Muhamamdiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sosiologi melalui Seleksi Penerima Mahasiswa Baru (SPMB).